

Iran dan India Buka Jalan Lebih Baik Bagi Afghanistan

JAKARTA (IM)- Di bulan Mei ini, India dan Iran menandatangani sebuah perjanjian penting berdurasi 10 tahun untuk pengembangan Pelabuhan Chabahar. Perjanjian ini menandai momen penting bagi kerja sama regional, khususnya terkait peran integral Afghanistan dalam keberhasilan proyek strategis ini.

Pemerintahan sementara Taliban, dalam sebuah pernyataan menggarisbawahi manfaat ekonomi besar yang dapat diperoleh Afghanistan dari proyek Pelabuhan Chabahar yang didukung India. Pernyataan tersebut menekankan perlunya "dukungan politik" dari Afghanistan untuk mempertahankan dan memaksimalkan potensi proyek tersebut.

DR. Jasneet Bedi dari Khalsa Vox mengatakan, pelabuhan Chabahar menawarkan Afghanistan alternatif penting dibandingkan pelabuhan Karachi, sehingga mengurangi ketergantungan negara tersebut pada satu koridor perdagangan dan memperkuat kemandirian ekonominya. Diversifikasi ini sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Afghanistan, sehingga memungkinkan negara tersebut untuk menjalin hubungan dengan spektrum mitra dagang yang lebih luas di India, Asia Tengah, dan wilayah lainnya.

Arti strategis Chabahar tidak bisa dilebih-lebihkan. Sebagai jalur maritim langsung ke Samudera Hindia, pelabuhan ini secara signifikan meningkatkan kemampuan perdagangan Afghanistan. Perkembangan ini bukan sekedar peningkatan logistik namun merupakan peluang transformatif bagi negara yang tidak memiliki daratan untuk mengakses pasar global dan berintegrasi lebih dalam ke dalam perekonomian regional.

Merealisasikan signifikansi historis Chabahar, pernyataan Taliban menelusuri akarinya hingga Kekaisaran Achaemenid (550–330 SM), menyoroti peran lama mereka sebagai penghubung perdagangan. Keunggulan pelabuhan ini berlanjut hingga masa Kekaisaran Sassania (224–651 M), yang berfungsi sebagai penghubung penting antara Persia, anak benua India, dan wilayah lainnya. Konteks sejarah ini menggarisbawahi pentingnya Chabahar sebagai pusat perdagangan dan konektivitas. Perjanjian trilateral tahun 2016 antara India, Iran, dan Afghanistan untuk pengembangan Chabahar sebagai koridor transportasi dan perdagangan menjadi landasan bagi perjanjian baru-baru ini. Pakta saat ini semakin memperkuat upaya kolaboratif untuk mengubah Chabahar menjadi pintu gerbang perdagangan global, yang menjanjikan kemakmuran dan diversifikasi ekonomi ke Afghanistan. Bagi Afghanistan, partisipasi aktif dan kerja sama adalah yang terpenting. Keberhasilan Pelabuhan Chabahar bergantung pada komitmen Afghanistan dalam memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan konektivitas perdagangan dan integrasi regional. Pelabuhan berdiri sebagai simbol harapan dan potensi, menawarkan jalan menuju ketahanan ekonomi dan kesejahteraan.

Proyek Pelabuhan Chabahar lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur, ini adalah mercusuar transformasi ekonomi bagi Afghanistan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Afghanistan dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih terhubung, serta mengamankan posisinya dalam lanskap ekonomi global. Komitmen India, Iran, dan Afghanistan terhadap proyek ini mencerminkan visi bersama mengenai pertumbuhan dan stabilitas regional, serta menjanjikan era baru kerja sama dan pembangunan ekonomi. **tom**

Warga Gaza Ragu Putusan Mahkamah Internasional akan Hentikan Serangan Israel

GAZA (IM) – Warga Palestina tidak yakin Israel akan mematuhi perintah Mahkamah Internasional (ICJ). Dipaksa mengungsi dari rumahnya dalam perang Israel di Gaza, Salwa al-Masri tidak banyak berharap dengan perintah ICJ agar Israel menghentikan serangannya ke Rafah.

"Pembantaian hanya meningkat," katanya sambil memasak di dapur terbuka di tenda di Deir al-Balah, Minggu (26/5).

"Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa, sementara tindakan sesuatu yang berbeda," kata Masri yang terpaksa meninggalkan rumahnya di Gaza utara pada awal perang. "Kami ingin keputusan-keputusan ini diimplementasikan di lapangan," tambahnya.

Pada Jumat (24/5), hakim ICJ memerintahkan Israel untuk menahan serangan ke Rafah. Hal ini menandai perintah sementara dalam kasus yang diajukan Afrika Selatan (Afsel) atas genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

ICJ tidak memiliki kekuatan untuk memaksa perintahnya. Anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengatakan Israel akan melakukan perang "adil dan perlu" terhadap Hamas untuk memulangkan sandera yang ditawa dan memastikan keamanan Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel ke Gaza sudah menewaskan lebih dari 35 ribu orang Palestina. Israel membantah tuduhan genosida Afsel. Mereka mengatakan perang ini tidak cukup "karena agresi penjajah di seluruh Jalur Gaza dan terutama di Gaza utara brutal dan berbahaya." Seorang pengungsi lainnya Nabil Diab mengatakan yang dibutuhkan rakyat Palestina perang segera berhenti. Mereka, kata Diab, ingin melihat tindak untuk meraih itu. "Kami tidak membutuhkan deklarasi," tambahnya. **tom**



HARI KEMERDEKAAN YORDANIA DIRAYAKAN DI AMMAN

Raja Yordania Abdullah II (tengah) menghadiri upacara perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Yordania di Istana Al Husseinia di Amman, Yordania, Sabtu (25/5).

Serangan Junta Myanmar Tewaskan 359 Orang di 4 Bulan Pertama 2024

Selama empat bulan, serangan udara junta militer menghancurkan 50 rumah ibadah, 38 sekolah, dan 11 pusat kesehatan, demikian laporan dari kelompok peneliti tersebut.

JENEWA(IM)-

Serangan udara yang dilancarkan oleh junta militer Myanmar telah menewaskan 359 warga sipil, termasuk 61 anak-anak, dan melukai 756 lainnya selama empat bulan pertama tahun 2024, menurut laporan terbaru, hari Sabtu, (25/5).

Tren kematian akibat serangan udara oleh junta militer melonjak sejak kudeta tahun 2021. Angka kematian melonjak dari 63 pada tahun 2021 menjadi 260 pada tahun 2022, dan

mencapai 613 orang pada tahun 2023, demikian laporan dari Nyan Lit Thit Analytica, sebuah lembaga yang memantau pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Pengeboman dan serangan udara junta militer terjadi setiap hari sepanjang periode Januari hingga April, dengan total 819 serangan udara yang tercatat. Rata-rata, setidaknya ada enam serangan per hari.

Wilayah yang paling sering menjadi sasaran serangan adalah Nega-

ra Bagian Rakhine, yang mengalami 187 serangan udara, diikuti oleh Wilayah Sagaing sebanyak 119 kali.

Selama empat bulan tersebut, serangan udara junta militer menghancurkan 50 rumah ibadah, 38 sekolah, dan 11 pusat kesehatan, demikian laporan dari kelompok peneliti tersebut.

Selain itu, laporan tersebut juga mencatat enam kasus dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim di beberapa wilayah.

Menurut seorang analis militer, peningkatan serangan udara ini mungkin disebabkan oleh kehilangan wilayah yang signifikan oleh pasukan junta.

Tujuan dari serangan udara ini tampaknya untuk menghambat upaya pasukan pemberontak dalam

membangun perdamaian dan stabilitas, serta mengganggu kehidupan sipil.

Sejak kudeta pada Februari 2021, tercatat 2.471 serangan udara hingga 30 April 2024, yang menyebabkan tewasnya 1.295 orang. Sementara itu, upaya internasional untuk menemukan solusi yang berkelanjutan terhadap krisis ini masih terus berlanjut.

Hari Jumat sebelumnya, kantor hak asasi manusia PBB melaporkan sekitar 45.000 warga etnis Rohingya mengungsi ke wilayah dekat perbatasan dengan Bangladesh akibat pertempuran yang sedang berlangsung di Negara Bagian Rakhine.

"Kami mendapat laporan yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan

dari Negara Bagian Rakhine di Myanmar utara mengenai dampak konflik terhadap kehidupan dan harta benda warga sipil. Beberapa tuduhan yang paling serius berkaitan dengan insiden pembunuhan warga sipil Rohingya dan penghancuran properti mereka," ungkap juru bicara PBB, Liz Throssell, dalam sebuah konferensi pers di Jenewa.

Mayoritas warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh menghindari kekerasan brutal militer di Rakhine pada tahun 2017. Mereka sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, namun sejak akhir tahun 2020, lebih dari 33.000 orang telah dipindahkan ke pulau Bhasan Char. **tom**

Menhan Spanyol Sebut Perang Gaza Bentuk Genosida yang Nyata

MADRID(IM)- Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles mengatakan perang di Gaza, Palestina sebagai bentuk genosida yang nyata. Dia menyerukan agar konflik ini segera diakhiri. Dilansir Reuters, Minggu (26/5), hubungan antara Israel dan Spanyol memburuk menyusul keputusan Madrid untuk mengakui negara Palestina.

Reuters tidak dapat segera menghubungi pejabat Israel untuk memberikan komentar pada hari Sabtu (26/5), hari Sabtu Yahudi. Israel dengan tegas menolak tuduhan yang dilontarkan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa mereka melakukan genosida terhadap warga Palestina. Israel mengatakan bahwa mereka melancarkan perang terhadap kelompok militan Hamas yang menyerang pada 7 Oktober.

Adapun pernyataan Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles terkait genosida di Gaza ini muncul dalam wawancara dengan televisi pemerintah TVE. Komentarnya ini senada dengan komentar Wakil Perdana Menteri Spanyol Yolanda Diaz yang awal pekan ini, yang juga menggambarkan konflik Gaza sebagai genosida. "Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di Gaza, yang merupakan genosida nyata," kata Robles dalam wawancara tersebut.

Dia juga mengatakan pengakuan Madrid atas Palestina bukanlah sebuah tindakan melawan Israel. Dia

menambahkan bahwa pengakuan tersebut dirancang untuk membantu 'mengakhiri kekerasan di Gaza'.

"Ini tidak melawan siapapun, ini tidak melawan negara Israel, ini tidak melawan Israel, yang merupakan orang-orang yang kami hormati," katanya.

Invasi Israel di Gaza telah menewaskan hampir 36.000 warga Palestina. Data berdasarkan data pejabat kesehatan Gaza. Selain itu, invasi juga menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

Spanyol, bersama dengan Irlandia dan Norwegia, minggu ini mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina pada tanggal 28 Mei. Pengakuan ini memicu kemarahan Israel. **ans**

Korban Terdampak Musibah Tanah Longsor di Papua Nugini Tembus 4 Ribu Orang

SYDNEY (IM)- CARE kelompok kemanusiaan dari Australia melaporkan ada lebih dari 4 ribu orang terdampak musibah tanah longsor yang meratakan sebuah desa di bagian utara Papua Nugini pada Jumat (24/5) sekitar pukul 3 subuh.

Ratusan orang dikawatirkan tewas dalam musibah tanah longsor yang meratakan desa Koakalam di Provinsi Enga atau sekitar 600 kilometer dari utara Ibu Kota Moresby.

Menurut Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), lebih dari enam desa terdampak musibah tanah longsor di Provinsi Mulitaka, yang media setempatewartakan mengubur lebih dari 300 orang dan lebih dari 1.100 rumah.

Sedangkan CARE Australia pada Sabtu (26/5), mengatakan hampir 4 ribu orang hidup di area zona yang terkena musibah tersebut sehingga jumlah korban tewas kemungkinan lebih tinggi dari yang diprediski mengingat ada sebuah tempat penampungan pengungsian yang melarikan diri dari konflik di dekat area musibah tanah longsor.

Pada Februari 2024, setidaknya 26 laki-laki tewas di Provinsi Enga dalam sebuah penyerangan kekerasan antar

suku hingga mendorong Perdana Menteri Papua Nugini James Marape memberikan wewenang pada pucuk pimpinan militer negara itu untuk melakukan penangkapan.

CARE pada Jumat (25/5), mengatakan musibah tanah longsor telah meninggalkan puing-puing setinggi 8 meter, menutup akses ke jalan raya yang menyulitkan sulitnya pendistribusian bantuan.

Australian Broadcasting Corp dalam laporannya Sabtu, 25 helikopter hanyalah satu-satunya cara untuk menjangkau area terdampak musibah tanah longsor. Ada empat jenazah yang sudah diangkat dari tumpukan puing-puing.

"Banyak rumah-rumah di kaki gunung berisiko terperosok dalam tanah longsor," kata Juru bicara CARE.

Perdana Menteri Marape mengatakan ahli di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum Papua Nugini sudah dikerahkan untuk membantu dan upaya pemulihan paska-bencana.

Media sosial banyak yang beredar foto-foto kondisi desa Ninga Role, di mana orang-orang menaiki batu, memotong pohon demi bisa menyelamatkan orang-orang yang bisa diselamatkan. Seorang ibu menangis saat proses evakuasi dilakukan. **tom**



RAPAT UMUM KONGRES NASIONAL AFRIKA SEBELUM PEMILU
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa yang juga Presiden Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa, berbicara pada rapat umum terakhir partai tersebut menjelang pemilu mendatang di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (25/5).